

ABSTRAK

Satwa liar dilindungi merupakan sumber daya alam hayati yang perlu dijaga kelestariannya agar dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Namun potensi sumber daya alam Indonesia mulai terganggu karena praktek perdagangan satwa dilindungi yang memiliki berbagai macam modus. peningkatan kejahatan tersebut terjadi karena faktor ekonomi, lemahnya penegakkan hukum, serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Terlebih lagi, pelaku pada kejahatan ini memiliki jaringan nasional dan internasional. Regulasi terkait perdagangan satwa dilindungi yakni Undang-Undang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya nampaknya tidak mengakomodasi subjek pelaku korporasi dan masih belum memberikan efek jera. Lembaga penegak hukum perlu menggunakan berbagai peraturan yang ada salah satunya menggunakan instrumen pencucian uang dengan konsisten.

Penelitian hukum ini membahas perdagangan satwa yang dilindungi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa yang dilindungi berimplikasi tindak pidana pencucian uang dengan metode pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa beberapa praktek perdagangan satwa dilindungi sulit terdeteksi, salah satunya karena hasil tindak pidana telah masuk pada *legal market*. Hal ini menunjukkan pentingnya instrumen hukum untuk menjerat subjek pelaku yang memproses pencucian uang di dalamnya. Pertanggungjawaban pelaku dalam perdagangan satwa liar dilindungi dapat menggunakan regulasi hukum yang ada pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya dapat memenuhi syarat sebagai tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa liar dilindungi dapat berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang, sehingga Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi instrumen hukum untuk memberantas kejahatan ini. Saran dari hasil penelitian ini adalah seyogyanya pemerintah senantiasa mengawasi kegiatan yang berkaitan perdagangan satwa liar dilindungi, memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan membuat regulasi tentang korporasi di dalam perdagangan satwa liar dilindungi.

Kata Kunci : perdagangan satwa liar dilindungi, konservasi, pencucian uang

ABSTRACT

Protected wildlife is one of biological natural resources that needs to be protected so it can be sustainably maintained and can be used continuously. However, the potential of natural resources began to be disrupted due to the practice of trading in protected animal that have various modus. Increased the crime occurs due to economic factors, weak law enforcement, and it is supported by high market demand. Moreover, the suspect of these crimes have national and international networks. Regulation related to protected animal trade is Conservation of Biological Resources and their Ecosystems Law, this regulation seem do not accommodate the subject of corporate actors and have not given deterrent effect. Law enforcement needs to use various existing regulation, one of them is use money laundering instruments consistently.

This legal research discusses the protected animal trade as origin crime in money laundering and the responsibility of the suspect in the trade of protected wildlife that implicates the crime of money laundering with the research method of the state approach and conceptual approach. Based on the study it can be known that some protected animal trade practices are difficult to detect, one of them as the result of criminal acts have entered the legal market. This shows the important of legal instrument to ensnare the actor who process money laundering on it. The liability of perpetrators in the protected wildlife trade can use the existing legal regulation in Prevention and Eradication of Money Laundering law.

The conclusion of this study are Conservation of Biological Resources and their Ecosystems Law can be qualified as a predicate crime in money laundering crime. The liability of protected wildlife traffickers can implicate to money laundering, so the Prevention and Eradication of Money Laundering law can be a legal instrument to combat this crime. Suggestion of this research are the government should supervises activities related to the trade in protected wildlife, provide education the the public about the importance of maintaining ecosystem balance and make regulation about corporate in protected wildlife trade.

Keywords: the trade in protected wildlife, conservation, money laundering